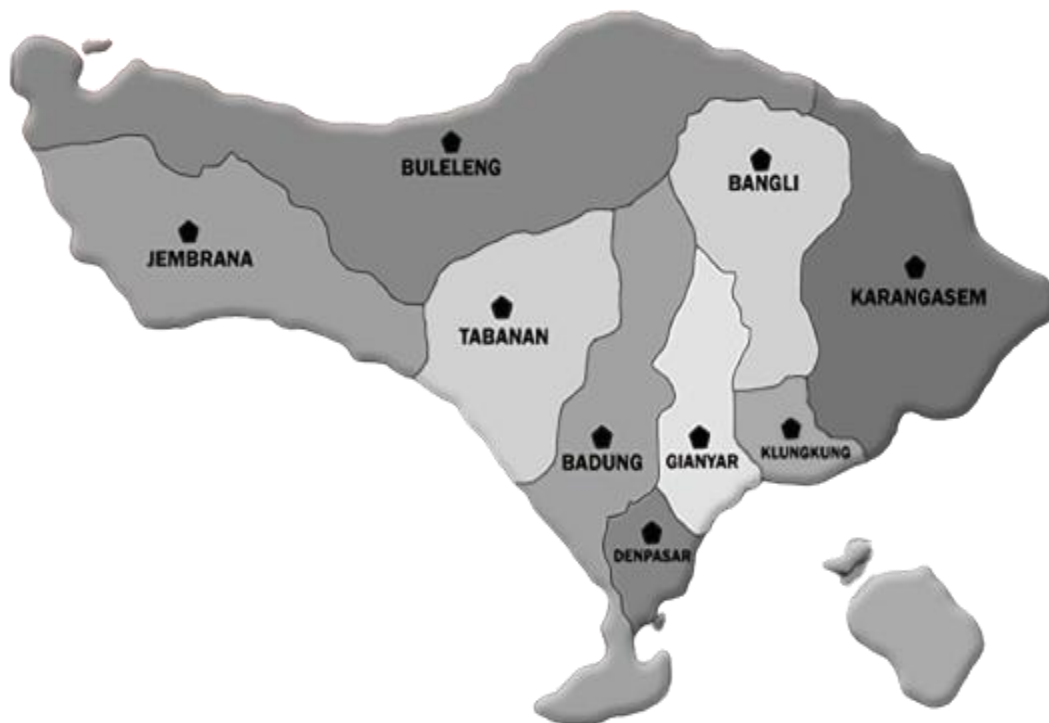


PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN *BILATERAL MEETING* TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2023

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 telah mempedomani Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai suatu dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjadi jembatan antara Perencanaan Strategis Jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu proses penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Proses penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 dilaksanakan melalui mekanisme/tahapan yang diawali dari tahapan "*Bilateral Meeting*" sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Partisipatif (*participative*) Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa masyarakat yang akan diuntungkan oleh (atau memperoleh manfaat dari)

perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.

2. Prinsip Kestinambungan (*sustainable*) Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya terdiri atas satu tahap akan tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan jangan sampai terjadi kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dilaksanakan.
3. Prinsip Keseluruhan (*holistic*) Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan, pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Dalam konsep tersebut unsur yang dikehendaki selain harus mencakup hal-hal di atas juga mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial yang diselaraskan dengan RPD yang sedang disusun.
3. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD);
4. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan

5. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Bilateral Meeting merupakan program inovasi yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Bali sebagai langkah awal dalam rangkaian penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan diselenggarakannya *Bilateral Meeting* adalah untuk

1. Penajaman rumusan Permasalahan dalam Pembangunan Daerah Tahun 2024 dikaitkan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
2. Penajaman data Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta usulan target dan pendanaan yang akan diusulkan pada tahun 2024. Semakin jelas dan semakin terukur Perangkat Daerah dalam menyajikan data evaluasi dan target, maka akan mendapat prioritas pendanaan.
3. Membahas keselarasan pencapaian indikator Perangkat Daerah dengan merujuk pada Rancangan Akhir RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah.
4. Membahas Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 memperhatikan aspek tematik, holistik (menyeluruh), Integrasi (terpadu) dan spasial untuk memperjelas arah lokasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah, sehingga mempermudah sinergitas penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan diKabupaten/Kota se-Bali dan memperjelas keselarasan arah usulan pendanaan Kabupaten/Kota se-Bali ke Provinsi.
5. Menentukan skala prioritas anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan kedalam 3 Kriteria yaitu:
 - a. *Fixed Cost* yaitu Anggaran Wajib Perangkat Daerah untuk anggaran Gaji dan Tunjangan PNS serta Gaji Tenaga Kontrak, operasional rutin dan wajib seperti listrik, air telpon, dan pemeliharaan kendaraan dinas

- b. Belanja Penunjang (Anggaran untuk rehab Gedung, pengadaan Komputer/Laptop)
- c. Belanja Prioritas (Anggaran untuk mendukung program unggulan perangkat daerah diluar tenaga kontrak).

C. Mekanisme Pelaksanaan

Bilateral meeting dilakukan dengan pola *desk* dialog interaktif, dimana peserta akan dibagi per kelompok yang terdiri dari unsur:

1. Penyaji :

- a. Perangkat Daerah, sesuai pembagian jadwal
- b. Instansi terkait

2. Pembahas :

Koordinator :

- a. Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali
- b. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Bali.
- c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Bali.
- d. Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Bappeda Provinsi Bali.

Teknis :

- a. Para Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Bali.
- b. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali.

D. Output Pelaksanaan

- 1. Tersusunnya Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dikaitkan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, untuk mendukung penyusunan Bab II RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024;
- 2. Tersusunnya Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta usulan target dan pendanaan serta lokasi yang akan diusulkan pada tahun 2024 yang mengacu pada Rancangan Akhir RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

KETIGA : Skala Prioritas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam penentuan pagu anggaran sebagaimana tabel berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH	GAJI DAN TUNJANGAN (ASN)	GAJI DAN THR TENAGA KONTRAK	KESEKRE-TARIATAN (Fixed Cost)	KESEKRE-TARIATAN (Penunjang)	BELANJA PRIORITAS	TOTAL
1							

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagai bahan Perumusan Rancangan Awal RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024.

Penyaji,

Pembahas,

(Pejabat Perangkat Daerah)

(Pejabat Bappeda Provinsi Bali)

Pangkat

Pangkat

NIP.

NIP.

E. Susunan Acara

Susunan Acara *Bilateral Meeting* Tahun 2023

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
Hari/Tanggal : Senin, 6 Februari 2023			
1	08:00 - 08:30 Tempat: RR. Cempaka Bappeda Provinsi Bali	Pengarahan Kepala Bappeda Provinsi Bali	Seluruh Kelompok Ahli Pembangunan, Sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan Bappeda, seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali serta instansi terkait
2	09:00 - 12:00 Tempat: RR. Melati Bappeda Provinsi Bali	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang Infrastruktur Kewilayahan terkait Prasarana Pekerjaan Umum: 1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	1. Ir. Ketut Dharmawahana 2. Ir. Putu Dana Pariawan Salain, M.Sc. MIHT. 3. Ir. Made Arca Eriawan, MM. 4. Ir. I Putu Gde Rasjmawan 5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 6. Luh Putu Nia Arisantini Sudibia, S.STP., M.Si. 7. Titik Rusmiyati, S.Sos 8. Dewa Ketut Yogiswara, SE. 9. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
3	09:00 - 12:00 Tempat: RR. Jempering Bappeda Provinsi Bali	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang Perekonomian dan SDA terkait Ekonomi: 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Pariwisata 4. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	1. I Ketut Jaman, SS., M.Si. 2. Cipto Aji Gunawan 3. Sugeng Pramono, SE., S.Par 4. Prof. Dr. Ir. I Gde Pitana, M.Sc. 5. Drs. I Ketut Sumarta 6. Drs. I Wayan Mudana Budha, M.Si. 7. I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, SE., MBA. 8. Dr. Gusti Kade Sutawa, SE., MM. 9. Dr. I Gede Made Sadguna, SE., MBA., DBA. 10. Ir. Ketut Puspawati, MBA.T.

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
			11. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA 12. Ida Bagus Putrayasa, SE 13. Nyoman Mangku Artini, SE., MM. 14. Dewa Ayu Citra Febriani, S.STP, M.AP. 15. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
4	09:00 - 12:00 Tempat: RR. Cempaka Bappeda Provinsi Bali	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terkait Kesejahteraan Sosial: 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 4. Dinas Kebudayaan	1. Drs. Gede Nala Antara, M.Hum 2. Dr. Eng. Ir. Wayan Kastawan, ST., MA. 3. Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn., M.Sn. 4. Prof. Dr. rer. Nat. I Made Agus Gelgel Wirasuta, M.Si., Apt. 5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 6. Kadek Dwi Sutrisna, S.IP. 7. Ir. I Putu Astawa, M.M.A. 8. I Putu Wira Utama, S.Si., M.Si. 9. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
5	12:00 - 12:30	ISTIRAHAT	
6	12:30 - 14:00 Tempat: RR. Melati Bappeda Provinsi Bali	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terkait Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi: 1. Dinas Perhubungan	1. Ir. Ketut Dharmawahana 2. Ir. Putu Dana Pariawan Salain, M.Sc. MIHT. 3. Ir. Made Arca Eriawan, MM. 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 5. Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, SE., M.Si. 6. Titik Rusmiyati, S.Sos 7. Dewa Ketut Yogiswara, SE. 8. Tim Admin SIPD/E-Plan

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
			Bappeda Provinsi Bali
7	14:15 - 15:30 Tempat: RR. Melati Bappeda Provinsi Bali	Penyampaian dan Pembahasan Materi Unit Substansi Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi: 1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1. Pimpinan Nusa Bali 2. I Putu Putra Jaya Wardana, SE., MT. 3. I Wayan Juniarta 4. Drs. I Made Nariana 5. I Dewa Made Krishna Muku, ST., MT. 6. I Made Artana, S.Kom., M.M. 7. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 8. Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, SE., M.Si. 9. Titik Rusmiyati, S.Sos 10. Dewa Ketut Yogiswara, SE. 11. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
8	12:30 - 15:30 Tempat: RR. Jempiring Bappeda Provinsi Bali	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang Perekonomian dan SDA terkait Sumber Daya Alam: 1. Badan Riset dan Inovasi Daerah 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Rektor Universitas Hindu Indonesia 2. Prof Dr. drh. I Made Damriyasa, MS. 3. Prof. Dr. Ir. I Wayan Supartha, MS. 4. Dr. Ir. I Ketut Sudiarta, M.Si. 5. Prof.Ir. I Made Supartha Utama, MS., Ph.D. 6. Ir. Ida Bagus Wisnuardhana, M.Si. 7. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA 8. Anak Agung Ngurah Mahadiksita Sadhaka, S.Sos. 9. Nyoman Mangku Artini, SE., MM. 10. Dewa Ayu Citra Febriani, S.STP, M.AP. 11. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
9	12:30 - 15:30 Tempat: RR. Cempaka Bappeda Provinsi Bali	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terkait Pembangunan Manusia: 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Ketua MICE Bali. 2. Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd. 3. Ir. Tjokorda Bagus Oka Ph.D. 4. Prof. Ir. Ida Ayu Dwi Giriantari, MEngSc., PhD. 5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 6. Ida Ayu Made Basunari, SE. 7. Ir. I Putu Astawa, M.M.A. 8. I Putu Wira Utama, S.Si., M.Si. 9. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
Hari/Tanggal : Selasa, 7 Februari 2023			
1	09:00 - 12:00 Tempat: RR. Melati Bappeda Provinsi Bali	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terkait Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah: 1. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Ir. Putu Dana Pariawan Salain, M.Sc. MIHT. 2. Ir. Made Arca Eriawan, MM 3. I Gede Sudiarta, S.Sos., M.Si. 4. Prof. Ir. Made Sudiana Mahendra, MappSc., PhD,C.IEA. 5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 6. Ngurah Bagus Gede Pasek Wira Kusuma, ST., MM. 7. Titik Rusmiyati, S.Sos. 8. Dewa Ketut Yogiswara, SE. 9. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
2	09:00 - 12:00 Tempat: RR.	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang	1. Ketua STIKOM Bali 2. Dr. I Gede Made Sadguna,

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
	Jempiring Bappeda Provinsi Bali	Perekonomian dan SDA Terkait Keuangan dan Investasi: 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Pendapatan Daerah	SE., MBA., DBA. 3. Ir. Ketut Puspawati, MBA.T. 4. Ketut Mangku, SH., MH. 5. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA 6. Ida Ayu Mirah Pertiwi, S.Kom., M.Si 7. Nyoman Mangku Artini, SE., MM. 8. Dewa Ayu Citra Febriani, S.STP, M.AP. 9. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
3	09:00 - 12:00 Tempat: RR. Cempaka Bappeda Provinsi Bali	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terkait Pemerintahan: 1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Biro Umum dan Protokol 3. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian 4. Biro Hukum 5. Biro Organisasi 6. Sekretariat DPRD	1. Ketut Sugiasa, SH., M.Si. 2. Brigjen Pol (Purn) Dewa Made Parsana 3. Dr. I Made Suwandi 4. Made Arimbawa, SH., MM 5. Dr. A. A. Gede Oka Wisnu Murti, M.Si. 6. Drs. I Made Artadana, M.Si. 7. Adenan, SE. 8. Umar Ibnu Alkhatab, S.SOs., M.Si. 9. Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH., M.Hum. 10. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 11. I Putu Suparta Jaya, S.STP 12. Ir. I Putu Astawa, M.M.A. 13. I Putu Wira Utama, S.Si., M.Si. 14. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
4	12:00 - 12:30	ISHOMA	
5	12:30 - 15:30 Tempat: RR. Cempaka	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang	1. Ketut Sugiasa, SH., M.Si. 2. Brigjen Pol (Purn) Dewa Made Parsana

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
	Bappeda Provinsi Bali	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terkait Pemerintahan: 1. Badan Penghubung 2. Inspektorat 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5. Satuan Polisi Pamong Praja	3. Dr. I Made Suwandi 4. Made Arimbawa, SH., MM 5. Dr. A. A. Gede Oka Wisnu Murti, M.Si. 6. Drs. I Made Artadana, M.Si. 7. Adenan, SE. 8. Umar Ibnu Alkhatab, S.SOs., M.Si. 9. Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH., M.Hum. 10. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 11. I Putu Suparta Jaya, S.STP 12. Ir. I Putu Astawa, M.M.A. 13. I Putu Wira Utama, S.Si., M.Si. 14. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali